



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JEKVY HENDRA
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 627841

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.110.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/75 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp. 475.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **424.700.000**

1. MOBIL, TOYOTA TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000
2. MOBIL, TOYOTA VIOS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
4. MOTOR, SEPEDA MOTOR BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOTOR, SEPEDA MOTOR BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
6. MOBIL, HONDA BRIO RS 1.2 CVTCKD Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **25.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.659.700.000
III. HUTANG	Rp.	393.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.266.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.